

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2011). *Sejarah dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Admosudirjo, P. (1998). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agus, S. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang (selanjutnya disebut Perihal Undang-Undang 2)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, E. M. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Halim, A. (2014). *Pidato Para Khilafah: Persoalan Negara, Demokrasi, dan Penegakan Hukum*. Surabaya: Nusantara Press.
- Iqbal, M. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maliki, Z. (2004). *Politikus Busuk Fenomena Insensibilitas Moral Elite Politik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Rozali, A. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas "Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sarman, M. T. (2011). Jakarta.
- Sedarmayanti. (2013). *Kepemimpinan yang Baik dan Tata Kelola yang Baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Silahuddin, M. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Tyler, T. &. (2003). *Personality and Social Psychology Review*. The group engagement model: procedural justice, social identity, and cooperative behavior.

Veithzal, R. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (n.d.).

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 . (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (n.d.).

A., A. R. (2019). "*Pelaksanaan Transparansi Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)*". In *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

Audina, N. A. (2019). *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal*". In *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Muhibullah, R. (2016). *Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. In *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Phalevy, B. (2020). *Proses Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 (Studi Di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo*. In *Skripsi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- Susanto, E. (2019). *Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi di Desa Dalam Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi)*. In *Skripsi*. Jambi: Universitas Negeri Sultan Thaha Syaifuddin.
- Nurlalili Rahmawati, F. I. (2022). Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terhadap Peran Sentral Pengemban Adat Di Dusun Sade Lombok Tengah. *Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol. 2 No. 1*.